

KETERKAITAN POLITIK PENDIDIKAN DENGAN PERENCANAAN PENDIDIKAN

Sandra Gamba Indah¹

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: sandragambaindah@gmail.com¹

Article History:

Received: Juli 2021

Accepted: Agustus 2021

Published: November 2021

Keywords

Politik Pendidikan

Perencanaan pendidikan

Politik dengan perencanaan pendidikan

Abstract :

Political policies in education, such as learning policies have been born in both Europe or the United States and Japan after the birth of democracy in life from the 19th century. Meanwhile, it is impossible to develop without intelligent members. The brightest members only through education can be formed, education is directly or indirectly influenced by politics, both in macro and micro contexts. The integration of education and politics is plural. Meanwhile, through education can form individuals who participate in political life.

Keywords: Education Politics, Educational Planning, politics with educational planning.

Abstrak:

Kebijakan politik dalam pendidikan, seperti kebijakan belajar telah lahir di baik Eropa atau amerika serikat dan Jepang setelah lahirnya demokrasi dalam kehidupan dari abad ke 19. Sementara itu, tidak mungkin dapat dikembangkan tanpa anggota yang cerdas. Anggota paling cerdas hanya melalui pendidikan bisa terbentuk, pendidikan secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh politik, baik dalam konteks makro dan mikro. Integrasi pendidikan dan politik adalah jamak. Sementara itu, melalui pendidikan dapat membentuk individu individu yang berpartisipasi dalam kehidupan politik

Kata Kunci: Politik Pendidikan, perencanaan pendidikan, politik dengan perencanaan pendidikan

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara tegas diatur dalam undang undang dasar 1945, yairtu pasal 29 termasuk Amandemennya pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewajiban Negara dan didukung oleh seluruh rakyat. Namun hingga saat ini implementasi amanat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam bidang pendidikan, bahkan disarankan masih sangat jauh dari yang di cita citakan, meskipun dari sisi perdana tahun, 2009 pemerintah telah menargetkan anggaran 20% dari APBN.

Setelah otonomi pendidikan sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah maka pengelolaan pendidikan tidak lagi sentralisasi dari pusat. Saat ini peran pemerintah daerah untuk memajukan pendidikannya menjadi sangat

terbuka meskipun masing-masing daerah memiliki kesulitan baik masalah sumber daya manusia maupun minimnya dana pendidikannya.

Tantangan perkembangan dunia saat ini menurut kemampuan sumber daya manusia yang tangguh dan memiliki kreativitas yang tinggi, tetapi bagaimana Negara mampu menyiapkan SDM yang berkualitas tersebut masih mencari pola hingga saat ini H.A.R. Tilar (Tilaar, 2003, p. 143) mengemukakan dua fungsi besar Negara, yaitu: mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat banyak dan mempersatukan rakyat banyak tersebut dalam suatu wadah yang disebut Negara.

Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik Negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan suatu Negara. Tidak berlebihan kiranya bila banyak ahli yang berpendapat pendidikan sebagai salah satu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan Negara. Michael W. Apple dalam Tilaar (Tilaar, 2003, p. 145) menjelaskan bahwa politik kebudayaan suatu Negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya sehingga dalam pendidikan tersalur kemauan kemauan politik atau system kekuasaan dalam suatu masyarakat.

Upaya menanamkan suatu prinsip, doktrin dan kesepakatan-kesepakatan Negara melalui pendidikan dilakukan dengan cara yang tidak dapat disalurkan secara sekilas karena biasanya berada secara implikasi dalam suatu materi pendidikan atau kurikulum sehingga secara tidak sadar sebenarnya masyarakat yang mengikuti dan memperoleh pendidikan telah mendukung pula tujuan khusus Negara tersebut.

PEMBAHASAN

Perencanaan pendidikan merupakan dasar pelaksanaan kegiatan dalam pendidikan dengan melihat kemasan yang akan datang untuk mengembangkan pendidikan agar dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan sehingga tujuan dari pendidikan juga terwujud sesuai harapan.

Perencanaan dianggap penting karena akan menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai dengan demikian suatu kerja akan berantakan dan tidak terarah jika tidak ada perencanaan yang matang, perencanaan yang matang dan disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan, penjelasan ini makin menguatkan alasan akan posisi strategis perencanaan dalam sebuah lembaga dalam perencanaan merupakan proses yang dikerjakan oleh seseorang.

Pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan menjadi titik sentral pembangunan. Manusia yang berkualitas memiliki keseimbangan antara tiga aspek yang ada padanya, yaitu aspek pribadi sebagai individu, aspek sosial dan aspek kebangsaan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki potensi fisik dan nonfisik; dengan potensi-potensi tersebut manusia mampu berkarya dan berbudi pekerti luhur.

Politik pendidikan adalah kajian tentang relasi anatara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara penyampainnya yang terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan

pendidikan dan bagaimana dan kemana perangkat tersebut akan diarahkan.

Selain itu politik pendidikan juga diartikan sebagai metode mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan politik pendidikan juga berorientasi pada bagaimana pendidikan dapat dicapai dengan baik. Berbeda dengan pendidikan politik, yakni usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik bagi perannya di dunia politik. Dan pendidikan politik ini juga menjadikan manusia melek akan politik.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud problematika politik pendidikan dengan perubahan sosial dan upaya solusinya adalah permasalahan yang berkaitan dengan kekutan dari penguasa pembuatan kebijakan di bidang pendidikan dalam rangka untuk mengubah struktur dan fungsi masyarakat serta upaya memecahkan permasalahan

Keterkaitan Antara Politik Dengan Pendidikan

Pendidikan selalu sepihak, pendidikan yang diberikan oleh pendidikan selalu berdasarkan keinginan pola penguasaan yang menetapkan kurikulum. Dan karenanya politik ternyata sangat terkait erat dengan pendidikan. Politik adalah kebijakan. Siapa yang menguasai politik atau siapa yang menjadi pemimpin dialah yang kemudian menentukan arah pendidikan. Hal seperti ini bisa membawa kedua hal positif dan negative.

Karena bahaya tersebut Ivan Illich menggambarkan bahwa pendidikan formal justru harus ditolak peningkatan ilmu harus dikaitkan dengan keberhasilan. Imaginasi murid dilatih untuk menerima jasa bukan nilai. Pelembagaan ternyata akan mengakibatkan polusi fisik, polarisasi sosial dan impotensi psikologis. Degradasi nilai ini ternyata semakin dipercepat ketika orang menganggap kebutuhan non material itu sebagai suatu komoditi. Karena itu sistem pendidikan formal harus ditolak.

Politik modern telah selalu melupakan perannya sebagai pendidikan, karena adanya gambaran "jasa" tersebut. Pendidikan hanya dipandang sebagai sebuah tujuan dan bukan proses belajar karenanya perubahan sosial yang seharusnya dibawa dalam pendidikan dilupakan. Semua tergantung apabila ternyata pemerintah yang baik, yang serius ingin memajukan pendidikan di negaranya, maka dunia pendidikan di Negara tersebut akan maju. Sebaliknya, apabila pemerintahan yang menetapkan kebijakan politik pendidikan adalah pemerintah yang kurang peduli terhadap pendidikan, maka politik pendidikannya akan menjadi sangat subyektif. Sebagaimana sebuah contoh pelajaran sejarah adalah sebuah pelajarannya yang sangat rentan terhadap manipulasi pendidikan. Sejarah bisa saja dituliskan berdasarkan pemenang sejarah, dan bukan berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi.

Secara negative, pendidikan bisa dipandang sebagai perpanjangan tangan penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya karena mereka memberikan pendidikan berdasarkan apa yang mereka suka dan inginkan agar kelanggengan kekuasaan mereka tetap terjaga. Politik pendidikan yang dibawa oleh pemerintah yang cenderung memandang pendidikan sebagai sebuah politik pendidikan yang sepihak, berdasarkan apa yang ingin diberikan oleh penguasa.

Sebaliknya apabila kita memandang politik pendidikan secara positif, di

mana pemerintah yang menetapkan kebijakan tersebut adalah benar benar serius terhadap perubahan sosial, maka politik pendidikan yang dibawa akan memberikan sebuah perubahan sosial yang positif. Masyarakat akan bisa di didik melalui pendidikan yang ditetapkan oleh politik pendidikan sebuah pemerintah tertentu.

Pendidikan yang diberikan juga harus sedemikian rupa sehingga tidak menekankan pada perubahan perubahan sosial dan kecerdasan. Pendidikan yang negative cenderung selalu menguntungkan kaum yang kuat. Padahal semestinya pendidikan ini bersifat membebaskan.

KESIMPULAN

Politik dan pendidikan pada dasarnya saling melengkapi. Pendidikan yang benar akan membawa sebuah politik pendidikan yang baik pula. Tidak dapat disangkal bahwa perubahan yang dibawa politik pendidikan tersebut dapat berjalan menuju dua arah, kea rah yang berkaitan tangan penguasa, atau kearah yang lebih membebaskan.

Perencanaa pendidikan merupakan dasar pelaksanaa kegiatan dalam pendidikan dengan melihat kemasam yang akan datang untuk mengembangkan pendidikan agar dapat lebih efektif dan efesien sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan sehingga tujuan dari pendidikan juga terwujud sesuai harapan.

Politik pendidikan adalah kajian tentang relasi anatara proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara penyampainnya yang terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan pendidikan dan bagaimana dan kemana perangkat tersebut akan diarahkan.

REFERENSI

Tilaar, H. (2003). *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indonesia Tera.